



B u l e t i n Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

JFX 2015

**Target Terlampaui Tapi
Belum Maksimal**

Kopi Gayo Jagoan SRG Aceh

**KBI Wacanakan
Derivatif Resi Gudang**

**SRG Rotan
Katingan Makin
Diperhitungkan**



- 4-7 **Berita Utama**
SRG Rotan, Katingan Makin Diperhitungkan
- 8-9 **Berjangka**
JFX 2015, Target Terlampaui Tapi Belum Maksimal
- 10-11 **Resi Gudang**
Kopi Gayo Jagoan SRG Aceh
- 12-13 **Pasar Lelang**
Transaksi PLK Jambi Masih Cukup Seksi

Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

14-15 Agenda Foto

16-17 Aktualita

- WPB Wajib Miliki Kompetensi Berkelas MEA
- Tingkatkan Likuiditas JFX Genjot Edukasi & Sosialisasi
- KBI Wacanakan Derivatif Resi Gudang
- Ekspor Timah dari Pasar Fisik BKDI Naik 12 %

18 Analisa

19 Breaking News

20 Info

21 Info SRG

22-24 KomiKita

Prosedur Penerbitan RG



24-25 Kolom

Potensi Bawang Merah Sebagai Subjek SRG



26-27 Kiprah

Riuh Rendah Pimpin KBI



**Penerbit**

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab

Sutriyono Edi

Redaktur

Marthin Simanungkalit

Penyunting/ Editor

Taufik KS
Annisa F Wulandari
Vera Hendrias

Redaksi

Poppy Juliyanti
Gita Regina

Fotografer

Apriliyanto

Sekretaris

Katimin

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Foto : Petugas Pengelola Gudang Rotan Kab. Katingan dari PT. BGR memberi penjelasan kartu komoditi SRG kepada masyarakat setempat. Gudang Rotan tersebut terletak di Kawasan Industri Rotan Hampangen, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah.

Ekonomi global yang diprediksi mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2015 tidak tampak membawa pengaruh negatif terhadap industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan yang dialami industri perdagangan berjangka komoditi selama tahun 2015 yakni sebesar 7,11 % dengan dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Total volume transaksi industri ini mencapai 6.590.530 lot.

Dari total transaksi sebesar 6.590.530 lot, porsi kontrak berjangka komoditi primer- multilateral mencapai 1.280.801 lot atau meningkat 15,47 % dari periode yang sama tahun 2014 yang sebesar 1.109.175 lot.

Sejak tahun 2012, share kontrak berjangka multilateral terus mengalami pertumbuhan dari kontrak bilateral. Yakni di tahun 2012 sebesar 14,26 %, 2013 meningkat menjadi 18,37 %, dan pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan yakni sebesar 18,03 %. Dan di tahun 2015, lalu, share kontrak berjangka multilateral mengalami lonjakan signifikan menjadi 19,43 %, atau terjadi peningkatan sebesar 7,76 % dibandingkan tahun 2014.

Kontrak berjangka multilateral yang mencatatkan volume tertinggi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI yakni kontrak berjangka CPO (CPOTR) sebesar 439.635 lot. Sedangkan di bursa Jakarta Futures Exchange- JFX yakni kontrak berjangka kopi robusta (RCF) sebesar 233.712 lot, dan emas 250 gram (GOL 250) 129.023 lot.

Dalam sebuah kesempatan di awal tahun 2016, ini, Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, mengutarakan, menurunnya harga-harga komoditas di pasar internasional tidak berbanding lurus dengan animo masyarakat terhadap investasi perdagangan berjangka komoditi. "Justru ketika harga komoditas turun, bursa berjangka menjadi sarana risk management yakni para pelaku

komoditi melakukan lindung nilai, katanya. "Melihat peningkatan positif ini, optimisme investasi di bidang perdagangan berjangka cukup menarik dan dapat didorong sehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional," kata Sutriyono Edi.

Senada dengan itu, Diurt JFX, Sthepanus Paulus Lumintang, mengatakan, keberhasilan JFX mendongkrak transaksi kontrak berjangka multilateral tidak terlepas dari program edukasi dan sosialisasi yang gencar dilakukan baik dikalangan masyarakat maupun di kalangan akademisi.

Di bidang Sistem Resi Gudang- SRG, sepanjang tahun 2015 juga tampak menunjukkan kinerja positif. Dipenghujung tahun 2015, Resi Gudang Rotan untuk pertama kalinya terbit di tanah air. Yakni di gudang SRG Rotan yang terletak di lokasi di Kawasan Industri Rotan Hampangen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. PT Bhandha Garah Reksa (Persero) yang bertindak sebagai Pengelola Gudang di gudang SRG Katingan menerbitkan 1 resi dengan nilai komoditi sebesar Rp 44,5 juta.

Dan sebelum itu, Resi Gudang Kopi juga untuk pertama kalinya terbit di Aceh Tengah, dengan nilai Rp 21,28 miliar.

Kinerja positif perdagangan berjangka komoditi dan SRG di tahun 2016, ini, tentunya diharapkan terus berkelanjutan. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan perekonomian nasional.

Akhir kata, Redaksi dengan rasa syukur mengucapkan 'Selamat Tahun Baru 2016' kepada seluruh pembaca setia Buletin Bappebti, yang di tahun ini memasuki tahun ke 15 sejak pertama kali diterbitkan. Saran dan kritik pembaca pun tetap ditunggu untuk pengembangan buletin yang kita cintai ini.

Tabik!!!



SRG Rotan Katingan Makin Diperhitungkan

Ketua DPRD, Kab. Katingan, I Mantir L. Nassa, didampingi Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen, Djunaedi, memotong pita tanda peresmian beroperasi nya gudang SRG Rotan Kab. Katingan.

Beroperasinya SRG Rotan yang pertama di Indonesia tepatnya di Kawasan Industri Rotan Hampangen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, semakin menunjukkan dominasi Indonesia menguasai hampir 90 % pasokan rotan dunia.

Era tahun 1980-an hingga akhir tahun 1990-an, produk rotan asal Katingan, Kalimantan Tengah, tidak hanya dikenal di pasar domestik tetapi juga di mancanegara. Produk rotan yang menjadi ciri khas masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah, itu, membuat rotan bernilai tinggi.

Dalam kebudayaan masyarakat Dayak khususnya, dan juga di beberapa daerah di tanah air, komoditi rotan merupakan kebutuhan sehari-hari. Seperti peralatan rumah tangga, furniture, tas dan juga untuk dikonsumsi sebagai sayur.

Tingginya kebutuhan akan komoditi rotan baik untuk memenuhi pasar domestik maupun mancanegara, membuat lingkungan tanaman rotan yang berada di wilayah hutan lindung menjadi terancam rusak. Karena alasan menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah pun mengambil kebijakan pelarangan ekspor bahan baku rotan asalan. Namun,

produk rotan yang sudah melalui proses industrialisasi tetap diizinkan untuk di ekspor. Dengan demikian nilai tambah produk rotan tetap dapat dinikmati masyarakat petani rotan.

Kebijakan pemerintah yang tidak populer itu, berdampak pada rendahnya harga jual rotan di dalam negeri. Bahkan, sejumlah industri pengolahan rotan setengah jadi turut menjadi korban merugi alias 'gulung tikar'.

Melihat kondisi yang mencemaskan itu, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yakni menjadikan komoditi rotan sebagai salah satu komoditi yang dapat disimpan di gudang Sistem Resi Gudang. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/02/2013, tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG.

Salah satu tujuan keluarnya kebijakan



Menteri Perdagangan itu yakni, Resi Gudang Rotan dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Itu artinya, ketika harga cenderung rendah, petani tetap bisa memenuhi kebutuhannya dari nilai komoditi rotan yang tersimpan di gudang.

Keluarannya kebijakan Menteri Perdagangan itu disebut gerak cepat pemerintah Kabupaten Katingan. Tahun anggaran 2014, Pemda Kab. Katingan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun gudang SRG rotan yang pertama di Indonesia. Gudang SRG Rotan itu terletak di lokasi di Kawasan Industri Rotan Hampangen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Kab. Katingan, Saptul Anwar, dalam sambutannya pada peresmian Gudang SRG Rotan, 22 Desember 2015, mengatakan, berdirinya gudang rotan

tersebut diharapkan membangkitkan kembali masa-masa kejayaan rotan Katingan.

Hadir dalam peresmian Gudang SRG Rotan Kab. Katingan, itu, antara lain, Ketua DPRD, Kab. Katingan, I Mantir L. Nassa, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen, Djunaedi, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Retno Rukmawati, perwakilan WWF dan sejumlah petani rotan Kab. Katingan.

"Untuk membangkitkan kembali masa-masa kejayaan rotan Katingan ini, pimpinan kami sudah mengeluarkan instruksi agar semua SKPD- Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Katingan, untuk saling mendukung dalam berbagai kegiatan di bidang rotan," kata Saptul Anwar.

Dukungan dari berbagai organisasi pun sudah mengalir ke Pemda Katingan, Seperti dari lembaga internasional WWF- *World Wide Fund*, tambah Saptul Anwar.

"Sebagai contoh, WWF sudah memetakan wilayah tanaman rotan yang ada di 10 Kecamatan, Kabupaten Katingan. Pemetaan tanaman rotan ini sangat penting bagi keberlanjutan budidaya rotan di Katingan. Sehingga rotan yang keluar dari Katingan dapat diketahui asal usulnya, apakah dari hutan lindung atau dari hasil budidaya di lahan milik petani," jelas Saptul Anwar.

Lebih jauh dikatakan, Saptul Anwar, komoditi rotan merupakan salah satu komoditi yang berkontribusi besar

terhadap perekonomian Kab. Katingan. Hal itu dikarenakan lebih dari 600 ton rotan setiap bulannya ke luar dari Katingan.

"Jadi dengan beroperasinya gudang SRG Rotan, ini, diharapkan akan berdampak positif khususnya bagi kesejahteraan petani dan perekonomian daerah Katingan," ujar Saptul Anwar.

Kearifan Lokal

Ketua DPRD, Kab. Katingan, I Mantir L. Nassa, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, produk kerajinan rotan yang dihasilkan masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah, merupakan warisan yang bernilai tinggi.

"Kerajinan rotan dari Kabupaten Katingan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan, dan bahkan dikembangkan. Karena kerajinan rotan yang dihasilkan masyarakat Katingan memiliki ciri yang sangat khas jika dibandingkan kerajinan rotan dari daerah lain di Pulau Jawa. Kerajinan rotan motif khas Dayak, seperti kemang atau burung tingang, memiliki pasar yang cukup luas tidak hanya di dalam negeri tetapi juga sampai ke mancanegara," kata Mantir.

Lebih jauh dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, budidaya tanaman rotan yang memiliki nilai ekonomis mencakup beberapa jenis. Seperti jenis rotan manau, rotan taman, dan rotan sabutan. Tiga jenis rotan ini banyak digunakan masyarakat karena batangnya yang berkualitas sehingga bernilai ekonomis.



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Retno Rukmawati berbincang dengan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen, Djunaedi, Ketua DPRD, Kab. Katingan, I Mantir L. Nassa dan Kepala Disperindagkop Kab. Katingan, Saptul Anwar.



"Hal inilah salah satunya yang membuat Pemda Kabupaten Katingan memiliki visi 'Katingan sebagai Pusat Produksi dan Perdagangan Rotan di Indonesia.' Sebab itu kami berharap, beroperasinya Gudang SRG Rotan ini, akan melengkapi dan mendorong industrialisasi rotan yang berada di Kawasan Industri Rotan Katingan," ucap I Mantir L. Nassa.

Penghasil Devisa

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen Djunaedi, mengatakan, rotan merupakan salah satu komoditi penghasil devisa negara yang cukup besar. Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor barang kerajinan berbahan dasar rotan dan sebagai pemasok bahan baku produk rotan terbesar di dunia.

"Indonesia menjadi negara

pengekspor rotan terbesar di dunia, mengalahkan eksportir lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan negara Asia lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia menyuplai 80 % kebutuhan rotan dunia dan sekitar 90 % rotan dihasilkan dari hutan tropis di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi," terang Djunaedi.

"Kebijakan menjadikan rotan sebagai salah satu komoditas yang disimpan di gudang SRG adalah untuk menjembatani kebutuhan petani atau pemungut rotan dengan kalangan industri rotan," katanya.

Dengan demikian, tambah Djunaedi, produksi rotan yang dihasilkan di daerah sentra produksi dapat diserap dengan mudah dan terjamin mutunya oleh industri. Ketersediaan stok rotan yang memenuhi kebutuhan industri rotan dapat menjadi modal utama tumbuhnya industri rotan di dalam negeri yang berdaya saing tinggi.

"SRG merupakan instrumen perdagangan dan pembiayaan yang dapat mendukung upaya peningkatan daya saing perdagangan, dan perluasan akses peningkatan modal kerja bagi para petani, UKM, maupun pelaku usaha lainnya, termasuk untuk komoditas rotan," tegas Djunaedi.

Di ujung sambutannya, Djunaedi, mengatakan, optimalisasi pengembangan komoditas SRG, khususnya rotan, merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat dan Pemda Katingan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil menengah.

"Tentunya kerjasama seperti ini harus terus ditindaklanjuti, sehingga masyarakat petani rotan memiliki kepastian pasar. Dan, nilai tambah komoditi rotan semakin tinggi," pungkas Djunaedi.

Ketua Koperasi Perkumpulan Petani Rotan Katingan- P2RK, Uwei Batang Pabelum, Sarimanto



Ketua P2RK Uwei Batang Pabelum, Sarimanto (kanan) menerima Resi Gudang Rotan dari Pengelola Gudang PT. BGR.

Kebudayaan gudang Rotan dalam skema Sistem Resi Gudang- SRG akan banyak membantu para petani yang terhimpun di Koperasi Perkumpulan Petani Rotan Katingan- P2RK, Kecamatan Uwei Batang Pabelum. Sebab, jika selama ini anggota P2RK yang beranggotakan sebanyak 35 orang, mencari calon pembeli untuk menjual rotan. Tetapi saat ini, kami tinggal tunggu pembeli di gudang SRG.

Manfaat lainnya dengan datangnya pembeli ke gudang, petani pemilik rotan (P2RK) dapat menahan harga di tingkat yang wajar. Dan sebelum rotan berpindah tangan ke pembeli, petani pun bisa memperoleh pembiayaan dari perbankan.

"Jadi, SRG rotan ini sangat membantu para petani rotan," kata Sarimanto, yang memimpin Koperasi P2RK sejak berdiri tahun 2006.

Tingkat harga rotan yang wajar dan memberi keuntungan bagi petani berada dikisaran Rp 3.000 per kg rotan basah. Sedangkan harga rotan kering berkisar Rp 8.000 per kg.



Koordinator WWF, Kalimantan Tengah Indra Bayu Patimaleh



Saat ini harga rotan ditingkat petani masih sangat rendah. Harga rotan basah sekitar Rp 1.000 per kg, dan untuk rotan kering sekitar Rp 5.000 per kg.

Dengan tingkat harga rotan yang cenderung rendah itu, petani sulit untuk melakukan peremajaan tanaman rotan. Penghasilan petani dengan tingkat harga sebesar itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pada hal untuk menghasilkan rotan berkualitas, tanaman rotan pun perlu peremajaan.

Produksi rotan anggota P2RK setiap tahunnya menghasilkan sekitar 10 ton rotan kering. Sedangkan rata-rata kepemilikan lahan tanaman rotan mencapai 5 hektare per anggota. Dan umumnya lahan tanaman rotan milik anggota P2RK merupakan warisan dari orang tua.

“Dengan tingkat harga rotan yang wajar dan memberi keuntungan bagi petani, akan berdampak positif pada kelestarian lingkungan. Karena petani tidak mengalihfungsikan lahannya kepada jenis tanaman lainnya,” imbuh Sarimanto.

WWF dibantu IKEA dari Swedia sejak tahun 2011 setidaknya memiliki lima program prioritas dalam mendukung kelestarian tanaman rotan khususnya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Program prioritas itu antara lain melakukan advokasi petani, membantu pembibitan dan budidaya, pemanenan, pemasaran dan kreativitas produk-produk rotan.

Mengapa lima program itu menjadi prioritas? Karena sebelum ini banyak hasil rotan yang tidak jelas asal usulnya. Kalau rotan asalan sudah sampai dipasaran, kita tidak dapat mengetahui rotan itu dihasilkan dari wilayah mana.

Sebelum ini, dipasaran ada rotan yang dihasilkan dari wilayah hutan konservasi, tetapi ada juga yang dibudidayakan secara komersial di lahan milik petani. Asal usul rotan yang tidak jelas inilah salah satu faktor yang membuat harga rotan menjadi rendah.

Kalau rotan itu dihasilkan dari wilayah hutan konservasi, tentunya komoditas rotan itu illegal. Dan di sisi lain akan berpotensi merusak wilayah hutan konservasi yang dilindungi undang-undang.

Sebab itu, sejak WWF ikut terlibat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan sejumlah kementerian serta instansi terkait, telah berhasil memetakan wilayah produksi rotan di 21 desa dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan.

Jadi tujuan utama keterlibatan WWF di Kabupaten Katingan adalah agar sistem produksi rotan berkelanjutan dan memiliki legalitas. Namun, WWF bukan lah pihak yang mengeluarkan sertifikasi rotan sehingga mendapat pengakuan di pasar lokal maupun di mancanegara. Untuk mengeluarkan sertifikasi seperti itu ada lembaga tersendiri, seperti Sucofindo.

Dari pemetaan tanaman rotan yang WWF lakukan bersama Kebun Raya Bogor dan Lembaga Ilmu Pengetahuan- LIPI di tahun 2012, ada sebanyak 6 jenis rotan yang memiliki nilai ekonomis. Di sisi inilah peran WWF membantu petani membudidayakan rotan bernilai ekonomis di lahan milik petani. Dengan demikian rotan yang ada di wilayah konservasi tidak terganggu sehingga hutan tetap lestari.

Dari sisi advokasi, WWF berperan mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani rotan baik yang datangnya dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Seperti hadirnya Sistem Resi Gudang Rotan di Kabupaten Katingan, juga merupakan sokongan WWF terhadap pemerintah daerah agar petani atau pun koperasi petani rotan dapat memperoleh pembiayaan murah di saat harga cenderung.

Terbitnya Resi Gudang rotan yang pertama di Kabupaten Katingan, ini, sangat kami apresiasi. Kami pun tetap mengharapkan dukungan pemerintah agar program SRG Rotan ini terus dikembangkan. Sehingga petani rotan memiliki kepastian pasar dan tidak beralih pada komoditas lainnya yang berpotensi merusak lingkungan. Dan semoga SRG Rotan ini bisa menjadi model yang dapat dikembangkan di sentra produksi rotan lainnya.



THE CITY TOWER BUILDING, 22 DESEMBER 2015

JFX 2015 Target Terlampaui Tapi Belum Maksimal

Jakarta Futures Exchange- JFX di tahun 2015 menunjukkan kinerja cukup memuaskan. Beberapa gebrakan juga masih akan terus dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan berjangka di tahun 2016.

Pencapaian transaksi perdagangan berjangka di JFX atau Bursa Berjangka Jakarta- BBJ pada tahun 2015 cukup menggembirakan. Pasalnya, transaksi kontrak multilateral dan bilateral melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan data resmi JFX, kontrak multilateral yang ditargetkan naik 25 % ternyata melambung 69,82 %. Tercatat, semula ditargetkan hanya 412.199 lot per akhir Desember 2015, tapi transaksi diperkirakan bakal menembus sekitar 700.000 lot. Bahkan, data terbaru menunjukkan transaksi mencapai 700.264 lot per akhir Desember 2015. Demikian pula dengan kontrak bilateral, semula diperkirakan naik 9,70 % dari 3.331.687,7 lot per Desember 2014 menjadi sekitar 3.655.000 lot pada akhir Desember 2015. Namun dari data terbaru menunjukkan transaksi kontrak bilateral mencapai 3.718.457,7 lot per akhir Desember 2015. Dari data tersebut, jika dibandingkan dengan total volume transaksi bilateral,

maka kontrak multilateral mencapai 19,15 %.

Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang dalam keterangannya kepada media, di Gedung JFX, 22 Desember 2015, lalu, mengatakan, kontrak multilateral yang banyak diperdagangkan sepanjang tahun 2015 adalah kontrak berjangka komoditi Kopi. Tercatat, hingga 15 Desember 2015, transaksinya telah mencapai 294.659 lot atau 45,14 % dari keseluruhan kontrak multilateral. Kemudian disusul kontrak berjangka komoditi Emas sebesar 204,142 lot atau 31,27 % dari volume multilateral, dan kakao sebesar 69.051 lot atau 10,58 % dari total volume transaksi kontrak multilateral.

Kontrak berjangka komoditi Kopi mengalami pertumbuhan 70,42 % dari 172.904 lot pada pertengahan Desember tahun lalu menjadi 294.659 lot pada periode yang sama tahun ini. "Demand kopi di pasar lokal yang semakin tinggi dan harga yang membaik dibanding

tahun lalu. Inilah salah satu faktor yang pemicu pertumbuhan transaksi kopi di JFX," ucap Paulus.

Adapun kontrak Berjangka Emas tumbuh 104,83 % dari 99.664 lot pada pertengahan Desember 2014 menjadi 204,142 lot pada pertengahan Desember 2015. Harga emas yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2015 menjadi pendorong ramainya transaksi kontrak berjangka Emas di JFX.

Prospek & Outlook 2016

Harga-harga komoditi utama Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, JFX optimis akan terjadi kenaikan transaksi multilateral sebesar 250 % dari 600.000 lot pada tahun 2015 menjadi 1.500.000 lot pada tahun 2016.

Menurut Paulus, strategi yang akan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan



ini adalah melakukan revitalisasi dan fokus pada produk yang diminati oleh pelaku usaha. Satu contoh, kontrak berjangka komoditi Kopi, akan diluncurkan varian baru berupa kontrak berjangka *Hybrid* Kopi yang lebih familiar dan aplikatif bagi para pelaku usaha.

Demikian juga untuk kontrak berkala Emas. Sistem dan spesifikasinya akan lebih disesuaikan dengan kebutuhan nasabah retail dan beberapa kontrak lainnya. "Strategi lain adalah mengajak anggota JFX dan masyarakat pelaku usaha serta para investor untuk melakukan transaksi multilateral," tuturnya.

Sementara itu, JFX juga menargetkan transaksi Bilateral dapat tumbuh 120 % atau naik menjadi 4.386.000 lot pada tahun 2016, dari 3.655.000 lot pada tahun 2015.

Paulus menambahkan, pada tahun 2016, JFX akan fokus pada likuiditas *market* dan fokus pada produk unggulan JFX. Kontrak berjangka baru akan dibatasi kehadirannya, namun pasar fisik terorganisir akan dikembangkan terus sebagai pondasi penciptaan kontrak berjangka pada tahun-tahun selanjutnya.

Ada beberapa Pasar Fisik Terorganisir yang akan diluncurkan JFX pada tahun 2016. Diantaranya, Pasar Fisik Teh pada Januari 2016, Pasar Fisik Kopra pada Semester II 2016, dan Pasar Fisik Rumput Laut pada Semester II 2016.

Untuk progresnya, Paulus menjelaskan, Pasar Fisik Teh sebenarnya telah mendapatkan izin perdagangan dari Bappebti pada November tahun 2015. "Peluncuran kontrak teh sedikit mundur dari target," katanya.

"Sedangkan untuk Pasar Fisik Kopra, JFX masih akan melakukan pendekatan ke pelaku usaha kopra. Kami masih akan mendengarkan aspirasi pelaku pasar kopra di Riau, Sumatera Selatan, dan Ambon," ungkap Paulus.

Adapun untuk Pasar Fisik Rumput Laut, JFX sedang menjajaki membuka perdagangan rumput laut. Dan hal itu sejalan dengan program pemerintah. "Pemerintah saat ini tengah mendorong

pembudidayaan rumput laut."

Beberapa inisiatif lain juga akan dilakukan JFX. Pertama, meluncurkan Portal Ekspor Kopi (PEKI). Aplikasi ini nantinya menjadikan JFX sebagai pusat data perdagangan kopi di tanah air yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Kedua, revitalisasi kontrak PALN (penyaluran amanat luar negeri) yang akan mengakomodir kebutuhan pasar lokal. Ketiga, revitalisasi kontrak berjangka

Syariah yang dapat mendorong kinerja perbankan syariah.

Di sisi lain, Paulus mengatakan, sistem perdagangan JFX semakin mudah diakses dengan menggunakan semua tipe *platform gadget*, serta hadirnya JFX dalam *social media*. "Diharapkan semua itu dapat meningkatkan transaksi di JFX dan meningkatkan edukasi serta sosialisasi JFX kepada masyarakat," tutup Stephanus Paulus Lumintang. 

Pialang dan Pedagang dengan Transaksi Terbesar

Peran pialang tidak dapat dipisahkan dari peningkatan volume transaksi di JFX pada tahun 2015. Terdapat 10 Pialang dan 5 pedagang dengan transaksi terbesar pada tahun 2015, baik untuk kontrak multilateral maupun kontrak bilateral.

10 Pialang dan lima Pedagang dengan transaksi kontrak multilateral terbesar:

No	Pialang Berjangka	Volume	Perdagangan Berjangka	Volume
1	PT Interpan Pasifik Futures	385.982	PT Aperdi	73.738
2	PT Finex Berjangka	53.596	PT Royal Assetindo	48.416
3	PT Pruton Mega Berjangka	50.628	PT Menara Mas Investindo	44.230
4	PT Kresna Investa Futures	48.958	PT Halim Mitradana Internasional	31.609
5	PT Garuda Berjangka	47.026	PT Capital Megah Mandiri	27.741
6	PT Fortis Asia Futures	46.092		
7	PT Starpeak Equity Futures	40.320		
8	PT Agrodana Futures	36.760		
9	PT International Business Futures	35.796		
10	PT Victory International Futures	33.105		

10 Pialang dan lima Penyelenggara dengan transaksi kontrak bilateral terbesar:

No	Peserta	Volume	Penyelenggara	Volume
1	PT Monex Investindo Futures	273.643,2	PT Royal Assetindo	865.682,0
2	PT Velbury Asia Futures	245.296,3	PT Sentra Arta Maxima	558.954,7
3	PT Bestprofit Futures	233.354,0	PT Halim Mitradana Internasional	543.746,9
4	PT Mahadana Asta Berjangka	221.085,4	PT Surya Anugrah Mulya	305.928,3
5	PT Rifan Financindo Berjangka	220.995,0	PT Soegee Commodity	211.759,6
6	PT Agrodana Futures	204.412,1		
7	PT Garuda Berjangka	182.744,2		
8	PT Kontakperkasa Futures	170.579,0		
9	PT Interpan Pasifik Futures	154.648,3		
10	PT Soegee Futures	154.585,3		



Kopi Gayo Jagoan SRG Aceh

Nilai transaksi Resi Gudang Kopi Gayo diakhir tahun 2015 tercatat cukup fantastik. Prestasi gemilang itu membuat 'wajah' SRG Provinsi Aceh tampak sumringah.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti seakan tak pernah lelah terus mendorong implementasi gudang-gudang SRG di Indonesia. Satu contoh, Bappebti cukup berhasil mengimplementasikan dua gudang SRG untuk komoditi kopi arabika Gayo. Kedua gudang itu terletak di Provinsi Aceh, tepatnya satu berada di Kabupaten Aceh Tengah dan satu lagi terletak di Kabupaten Bener Meriah.

Data Bappebti menyebutkan, hingga 28 Desember 2015 tercatat di gudang SRG Aceh Tengah telah terbit 13 Resi Gudang (RG) kopi Gayo dengan total volume 440 ton. Nilainya pun sangat besar, yakni Rp 26.080.000.000. Adapun yang telah dibiayai oleh Bank BRI sebanyak 11 RG dengan total nilai Rp 15.480.000.000.

Pemilik kopi yang diresi gudangkan tersebut terdiri dari berbagai kelompok

tani (Poktan) binaan dari PT Katiara. Diantaranya, Poktan Katiara Queen, Katiara Gayo, Bunge Kemang, Tunes Muda, Ulen Reduk, Bintang Kejora, Megah Raya, Mawar Berseri, Jantung Hati, Reje Guru.

Sedangkan di gudang SRG Bener Meriah, tercatat hingga 28 Desember 2015, telah terbit sebanyak 4 RG kopi Gayo dengan total volume 82,8 ton dengan nilai komoditi sebesar Rp 4.722.600.000. Adapun yang dibiayai oleh Bank BRI sebanyak 4 Resi dengan nilai Rp 3.075.000.000. Dan, pemilik kopinya adalah KSU Gayo Mandiri.

Dengan terbitnya RG kopi Gayo diakhir tahun itu, total nilai RG sepanjang tahun 2015 di dua gudang SRG tersebut mencapai Rp 30.802.000.000. Sedangkan yang sudah diagunkan ke Bank BRI sebesar Rp 19.555.000.000.

Dari data itu, model pembiayaan

SRG yang digunakan adalah untuk penambahan modal (*trade financing*). Di mana stok kopi yang ada di gudang SRG dipergunakan untuk menambah modal untuk pembelian atau penambahan kopi.

"Implementasi kedua gudang SRG tersebut memang sangat memuaskan. Ini dapat dilihat dari nilai transaksinya yang fantastik," kata Kepala Bagian Pembinaan Pasar lelang dan SRG Bappebti, Yuli Edi Subagio kepada Buletin Bappebti, baru-baru ini.

Lebih jauh Yuli Edi memaparkan, kedua gudang SRG tersebut mengawal pemberdayaan kopi arabika Gayo. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, gudang SRG itu akan menjaga kedaulatan kopi arabika Gayo dari permainan harga dan *blending* (pencampuran kopi) oleh para *broker*.

Sekedar informasi, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Bappebti telah membangun gudang SRG di Kabupaten



Aceh Tengah pada tahun 2012. Sedangkan gudang SRG di Kabupaten Bener Meriah dibangun pada tahun 2013. Kedua gudang tersebut sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak tahun 2014. "Tapi karena saat itu panen kopi sudah berakhir, jadi tidak banyak barang yang masuk ke gudang SRG," jelasnya.

Secara rinci Yuli Edi juga menjelaskan sekilas gambaran tentang kedua gudang SRG tersebut. Untuk gudang SRG di Kabupaten Aceh Tengah, pengelola gudangnya adalah PT Bhandha Ghara Reksa yang mendampingi Calon Pengelola Gudang (lokal) PT Katiara. Untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Uji Mutunya adalah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Aceh. Dan yang menjadi bank pembiayaannya adalah Bank BRI Cabang Aceh Tengah.

Sedangkan untuk gudang SRG di Kabupaten Bener Meriah, pengelola gudangnya juga PT Bhandha Ghara Reksa yang mendampingi Calon Pengelola Gudang (lokal) Koperasi Gayo Mandiri. Adapun biaya pendampingan bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM selama 6 bulan (sampai Maret 2016). Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Uji Mutunya pun adalah BPSMB Provinsi Aceh. Untuk bank pembiayaannya juga Bank BRI Cabang Aceh Tengah, karena di Bener Meriah hanya ada Bank BRI Cabang Pembantu.

Menurut Yuli Edi Subagyo, meski implementasi dari dua gudang SRG tersebut sudah cukup membanggakan, tapi masih ada beberapa permasalahan yang harus dituntaskan. Diantaranya, perlu kecepatan bank mencairkan pembiayaan resi gudang; nilai pembiayaan resi yang sangat besar (diatas satu miliar rupiah) membuat ketakutan bank untuk mencairkan kredit SRG; Belum adanya bank lain, baik bank umum nasional atau pun bank daerah yang ikut membiayai SRG; dan kopi yang masuk gudang SRG di Bener Meriah didominasi oleh KSU Gayo Mandiri, sehingga menyulitkan pembiayaan skema-SRG. "Hal itu karena

terbentur dengan persyaratan yang ada," katanya.

Terkait itu, Yuli Edi, menyampaikan, ada beberapa pemecahan masalah yang dilakukan. Diantaranya, telah turun Bank BRI Pusat dan Bank BRI Wilayah Aceh ke BRI Cabang Aceh Tengah untuk melakukan koordinasi pembiayaan SRG; mendorong bank umum nasional lainnya termasuk bank lokal (Bank Aceh) untuk turut membiayai SRG; telah berkomunikasi dengan Bupati Aceh Tengah agar dapat membantu dan mendorong bank lokal (Bank Aceh) dalam pembiayaan SRG; terakhir, agar tidak terbentur dengan persyaratan Skema-SRG, Bappebti menyarankan KSU Gayo Mandiri membentuk poktan-poktan pada anggota binaannya.

Teori Waduk

Dalam mata rantai perdagangan, posisi petani sebagai pemilik komoditi terletak pada posisi yang tidak menguntungkan atau mempunyai posisi tawar yang relatif rendah. Hal ini dapat dilihat ketika musim panen raya. Biasanya, harga selalu dipermainkan pelaku-pelaku besar yang mempunyai kekuatan untuk mengontrol harga.

Padahal, para petani yang telah berupaya untuk menghasilkan komoditi yang berkualitas baik. Hasil produksi yang berkualitas baik, seharusnya mendapatkan harga yang baik pula, sehingga berkorelasi dengan pendapatan petani yang bagus.

Tapi kenyataannya di lapangan, kata Yuli Edi, ketika hasil produksi bagus terutama ketika panen raya, justru terjadi *over supply* dan adanya permainan kelompok tertentu yang mengontrol harga. "Alhasil, harga akan jatuh. *Boro-boro* petani dapat memperoleh pendapatan yang baik, bisa-bisa rugi karena antara *cost production* lebih tinggi dari *revenue*," jelas Yuli Edi.

Di sisi lain, tambahnya, petani sebagai pemilik barang mempunyai prediksi bahwa dalam beberapa waktu harga komoditi akan naik. Setelah

panen, biasanya petani tetap datang ke sawah atau kebun untuk melakukan proses produksi seperti mengolah lahan, pemupukan, dan lainnya.

Untuk itu, solusi terbaik yakni petani pemilik barang dapat melakukan tunda jual, dimana petani memasukan barang ke dalam gudang SRG. Kemudian petani akan mendapat secarik kertas berharga yang bernama Resi Gudang yang nilainya sebesar barang dalam gudang. Kemudian pemilik barang dapat mengagunkan Resi Gudang tersebut ke bank sebagai agunan pinjam uang di bank.

"Sebenarnya Sistem Resi Gudang ini mengadopsi teori Waduk. Apabila musim hujan, jangan biarkan air hujan lari kemana mana yang bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, atau bencana lainnya," ujar Yuli Edi.

Karenanya, dia menambahkan, air hujan tersebut harus dimasukkan ke dalam tempat yang bernama waduk. Kemudian air yang ada di dalam waduk tersebut, dapat digunakan untuk irigasi yang mengairi sawah pertanian. Air waduk juga dapat digunakan untuk menggerakkan turbin untuk listrik, pariwisata, air minum atau lainnya. Demikian juga dengan komoditi pertanian. Ketika panen raya akan terjadi *over supply* sementara *demand* relatif tetap, sehingga harga akan jatuh. Untuk itu perlu di lakukan keseimbangan agar tidak terjadi *over supply*. "Petani dapat melakukan tunda jual dengan memasukan komoditi ke dalam gudang SRG. Lalu petani dapat menggunakan stok komoditi untuk pembiayaan dalam proses produksi berikutnya dengan mengagunkan Resi Gudang ke bank," paparnya.

Fungsi lainnya, petani juga dapat menggunakan stok komoditi sebagai agunan untuk menambah modal atau dikenal juga dengan istilah *trade financing*. Demikian pula dalam kontek ketahanan pangan, SRG dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui stok pangan wilayah, daerah dan nasional. 📍



Transaksi PLK Jambi Masih Cukup Seksi

cassiavera

Target transaksi Pasar Lelang Komoditi (PLK) Jambi di tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan.

Data Bappebti mencatat, total nilai transaksi PLK Jambi pada Januari hingga Desember 2015 mencapai Rp10.520,879. 000. Nilai tersebut dibukukan setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi menyelenggarakan lima kali PLK sepanjang tahun 2015.

Pencapaian itu, menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Provinsi Jambi, Filda Deviarni, sangat memuaskan. "Ini meningkat dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 10 miliar," ujarnya baru-baru ini. Adapun untuk jenis komoditas yang mendominasi transaksi penjualan selama ini, yaitu karet, pinang, *cassiavera* (kulit kayu manis), dan coklat.

Komoditas tersebut memang kerap menjadi primadona dalam pelaksanaan pasar lelang. Satu contoh, pada penyelenggaraan PLK yang ke-5 yang dilaksanakan pada 15 Desember 2015 lalu, menjadi komoditi unggulan yang meraih nilai transaksi terbesar.

Dari total transaksi yang mencapai Rp

845.800.000, *cassiavera* membukukan transaksi sebesar Rp 288 juta atau 34 % dari keseluruhan nilai transaksi.

"Kulit manis asal Kerinci itu, dijual dengan harga Rp 24 ribu per kilogramnya," terang Filda.

Sedangkan untuk komoditas lain yang juga berhasil ditransaksikan, diantaranya, karet, pinang, coklat, kacang kedelai, beras, dan kelapa. "Transaksi kelapa bulat mencapai 30,74 % dan pinang mencapai 8,71% dari total transaksi," ujarnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, PLK ini bertujuan untuk memasarkan produk agro Jambi. Selain itu, PLK juga akan mengurangi ketergantungan para petani atau produsen terhadap pembeli yang mempermainkan harga komoditi pertanian.

Karena itu, dalam meningkatkan daya saing komoditas agro yang tinggi, maka diperlukan keunggulan dari sistem perdagangan yang tangguh, efisien dan transparan. "Selama ini petani agro banyak menggunakan transaksi komoditas menggunakan sistem perdagangan lokal

yang masih bersifat tradisional," katanya.

Belum Direvitalisasi

Pada tahun 2016, Disperindag Provinsi Jambi menargetkan untuk menyelenggarakan sebanyak lima kali PLK. Pelaksanaan PLK itu masih akan tetap dikelola oleh Disperindag Provinsi Jambi. Pasalnya, menurut Filda, PLK Jambi belum akan direvitalisasi tahun ini. "Jambi dan 7 provinsi lainnya dinilai masih pada tahapan evaluasi, sementara yang sudah melaksanakan revitalisasi baru 5 provinsi," ujarnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2014 terdapat 14 Penyelenggara PLK yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Diantaranya, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta. Untuk penyelenggaraan Pasar Lelang oleh pihak swasta dilakukan oleh PT iPASAR Indonesia dan Pasar Fisik CPO Jakarta Futures Exchange.



Sebagai percontohan revitalisasi PLK, pada tahun 2014 telah terpilih 5 daerah dari 13 penyelenggara yang menggunakan dana APBN. Diantaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Kelima daerah tersebut, seluruhnya telah diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang kepada pihak swasta.

Saat ini telah diberikan persetujuan

kepada 5 Penyelenggara Pasar Lelang yang berasal dari pihak swasta yaitu Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, Koperasi Pegawai Negeri Praja Bali, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat dan PT Puspa Agro di Sidoarjo, dan Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (PUSKOMPAS) Makassar.

Melalui persetujuan ini, maka sejak tahun 2015 penyelenggaraan PLK yang

selama ini dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan akan dialihkan kepada Koperasi/lembaga yang telah diberikan persetujuan oleh Bappebti tersebut. Kedepan, Dinas yang membidangi perdagangan akan berperan sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pasar Lelang di bawah koordinasi Bappebti.

Gagal Serah Tinggi, PLK NTB Bakal Dievaluasi

Pada tahun 2015, Pasar lelang Komoditi (PLK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat total nilai transaksi sebesar Rp16.742.399.600. Meski angka itu cukup besar, tapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, mengklaim, kondisi gagal serahnya masih cukup tinggi.

Misalnya saja, berdasarkan catatan Disperindag NTB, nilai transaksi PLK yang selenggarakan pada 29 Oktober 2015 lalu cukup fantastis. Transaksinya berhasil menembus Rp1,640 miliar lebih. Tapi sayangnya, gagal serah yang terjadi justru hingga mencapai 50 persen.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag, Provinsi NTB, Ibnu Fikhi mengungkapkan, sepanjang tahun 2015, PLK di NTB diikuti sekitar 363 orang penjual, dan 56 orang pembeli dari Bali, Jawa Timur, dan NTB. "Tapi jumlah tersebut tak sebanding dengan kelanjutan transaksinya," keluh Ibnu, akhir Desember lalu.

Padahal, PLK merupakan pasar terorganisir dan wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang. Berdirinya pasar lelang bertujuan untuk efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, menciptakan harga referensi, serta membangun dan memperluas jaringan usaha. Dengan itu, kehadiran pasar lelang seharusnya dapat memberikan keuntungan baik bagi petani maupun pembeli. "Kami ingin mengembalikan pasar lelang ke tujuan semula. Caranya dengan mengevaluasi pasar lelang tahun 2016," katanya.

Lalu, seperti apa evaluasi yang bakal dilakukan?

"Menyerahkan kepada pihak swasta dan membuat sanksi, sehingga terjadinya gagal serah pasar lelang bakal menurun," jawab Fikhi.

Hanya saja, dia menambahkan, untuk mengatur sanksi itu, diperlukan peraturan yang mengikat seperti peraturan Gubernur. "Dalam peraturan itu nantinya akan ada pula lembaga penjaminnya, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak," ucapnya.

Ia berharap, dengan adanya peraturan itu, nantinya akan

ada keterikatan hukum antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pemerintah daerah bisa menghitung dengan jelas dan nyata seberapa banyak komoditas dari NTB yang keluar. "Mekanismenya juga akan dievaluasi, yang mengarah pada pasar lelang online untuk jangka panjang," katanya.

Komoditi Unggulan

Di Provinsi NTB, banyak komoditi unggulan yang dapat diperdagangkan dalam PLK. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa komoditi unggulan Provinsi NTB berasal dari sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan.

Di sektor pertanian, komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai, nanas, pisang, ubi jalar, ubi kayu, dan kentang. Sedangkan untuk sektor tanaman perkebunan terdiri dari komoditi kakao, kopi, kelapa, aren, cengkeh, jambu mete, jarak, kapuk, kemiri, lada, pinang, tembakau, dan vanili.

Adapun untuk sektor perikanan, komoditi yang diunggulkan berupa perikanan Tangkap, Budidaya Jaring Apung, Budidaya Keramba, Budidaya Kolam, Budidaya Laut, Budidaya Sawah dan Budidaya Tambak. Sedangkan untuk sektor peternakan komoditinya adalah sapi, babi, domba, kambing, kerbau, dan kuda.

Sementara itu, berdasarkan data Pemprov NTB yang dirilis dalam "NTB dalam Angka 2014", disebutkan, Provinsi NTB merupakan daerah penghasil bawang merah yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 produksi bawang merah mencapai 101.628 ton, dengan produksi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bima sebesar 80.218 ton.

Selain itu, NTB merupakan penghasil tembakau terbesar dalam produk nasional dan pemasok utama untuk industri rokok secara nasional. Produksi tembakau pada tahun 2013 mencapai 5.138,2 ton tembakau rakyat, dan 33.260 ton tembakau Virginia. Lainnya tercatat, produksi perikanan pada tahun 2013 sebanyak 886.135,45 ton yang terdiri dari 762.944,70 ton perikanan laut, dan 123.190,75 ton perikanan darat. 



Pengarahan Kepala Bappebti Kepada Para Pegawai Bappebti

Kepala Bappebti, Sutriono Edi memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Bappebti. Acara ini mengambil tema “Peningkatan Integritas Bappebti Melalui Implementasi Wilayah Tertib Administrasi (WTA)”, Rabu, 13 Januari 2016 lalu.

Dalam Pengarahannya, Sutriono, mengatakan, perlunya peningkatan kedisiplinan seluruh pegawai serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkoordinasi, integrasi dan kerjasama internal yang lebih baik untuk kegiatan tahun anggaran 2016.

Dai juga menyampaikan 9 langkah percepatan Bappebti. Diantaranya, peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai, orientasi kinerja berbasis kualitas yang paham kondisi lapangan, memastikan pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel, pengimplementasian sistem IT terintegrasi dan efektif, memprioritaskan peningkatan pelayanan prima kepada publik, mengedepankan upaya preventif, penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, menciptakan komunikasi sinergis yang proaktif dan interaktif, penegakan kode Etik ASN dan pemeriksa Bappebti

Acara tersebut dihadiri oleh 150 orang pegawai Bappebti. Acara itu juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara Pimpinan Bappebti dengan Pegawai Bappebti.



Bappebti Lakukan Pertemuan dengan AIPEG

Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi Pejabat Eselon II Bappebti melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Jumat (08/01)

Pertemuan tersebut membahas mengenai kerjasama antara Bappebti dengan AIPEG dalam hal pengembangan SDM dari pegawai Bappebti melalui pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Aipeg.





Sosialisasi SRG di Universitas Sam Ratulangi, Manado

Kepala Bappebti Kemendag, Sutriyono Edi membuka dan memberikan arahan pada acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Selasa (8/12).

Dalam arahannya, Sutriyono Edi menyampaikan bahwa ekonomi berbasis kerakyatan menjadi salah satu prioritas di pemerintahan baru. "SRG yang berbasis kerakyatan memiliki manfaat yang menyentuh ke masyarakat di level bawah," ujarnya.

Sosialisasi ini mengambil tema "Sistem Resi Gudang sebagai Penggerak Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Bangsa". Narasumber pada sosialisasi ini diantaranya Kepala Bappebti, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara dan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) dengan moderator Staf Ahli SRG, Ismadjaja Toengkagie

Sosialisasi dihadiri Sekretaris Bappebti, beberapa pejabat Eselon III dan IV Bappebti, perwakilan Bank Rakyat Indonesia di Sulawesi Utara dan 100 orang peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa FEB UNSRAT.



Peresmian Kantor Baru IPC dan APCC

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi memberikan sambutan dalam acara peresmian pembukaan kantor baru International Pepper Community (IPC) dan Asian & Pacific Coconut Community (APCC) di Gedung Bappebti, Lantai 8, Jakarta, Kamis (14/01).

Dalam sambutannya, Sutriyono menyambut baik peresmian kantor yang baru tersebut. Dia mengharapkan dapat bekerja sama dengan IPC dan APCC untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Indonesia.

Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan juga Ketua IPC dan APCC, Bachrul Chairi, Sekretaris Bappebti, Marthin, Direktur Eksekutif IPC, W.D.L Gunaratne, Direktur Eksekutif APCC, Uron N. Salum.



WPB Wajib Miliki Kompetensi Berkelas MEA

Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean- MEA di tahun 2016, Bappebti selaku otoritas perdagangan berjangka komoditi akan mengeluarkan kebijakan standardisasi Wakil Pialang Berjangka- WPB. Dengan demikian, tidak semua orang asing bisa menjadi WPB di industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia.

"Selain itu, kami juga mempersiapkan pegawai Bappebti agar punya keahlian dengan standar internasional. Karenanya pegawai Bappebti akan mengikuti pelatihan dan mendapatkan *Certified Information Systems Auditor- CISA*," jelas Kepala Bappebti, Sutriono Edi, kepada media di akhir Desember 2015, lalu.

Lebih jauh dikatakan Sutriono Edi, untuk pelaku bursa juga akan didorong untuk ikut aktif bekerjasama dengan bursa berjangka dari negara lain anggota Asean seperti Singapura dan Malaysia. Dengan demikian produk bursa berjangka Indonesia bisa ditransaksikan di luar negeri, begitu juga sebaliknya.

Dari sudut pandangan Sutriono Edi, tren penurunan harga komoditas di pasar internasional yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu tidak berkaitan langsung dengan bisnis perdagangan berjangka komoditi. "Justru di saat tren penurunan



harga komoditas itu peran bursa berjangka sangat penting, karena para pelaku komoditi dapat mengelola risikonya dengan melakukan lindung nilai- *hedging*," ujarnya.

"Sebagai contoh, dari data transaksi kontrak berjangka kopi di Jakarta Futures Exchange- JFX, pada periode Oktober 2015, naik 71 %, demikian juga dengan komoditi kakao naik 67 %. Kenaikan volume transaksi JFX itu menunjukkan bahwa pelaku komoditas mengambil posisi *hedging*," ucap Sutriono Edi. 

Tingkatkan Likuiditas JFX Genjot Edukasi & Sosialisasi



Jakarta Futures Exchange- JFX mengklaim likuiditas kontrak berjangka multilateral dan bilateral cukup memuaskan hingga akhir tahun 2015. Hal itu dicapai dengan efisiensi dan edukasi yang giat dilakukan JFX kepada para pelaku komoditi dan juga masyarakat.

"Edukasi dan sosialisasi merupakan kunci dari keberhasilan JFX di 2015 ini," jelas Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, kepada media di akhir tahun 2015.

Memang di pertengahan tahun 2015 sempat melakukan konsolidasi dan efisiensi, tambahnya. Hal itu terjadi dengan

terpilihnya jajaran direksi dan komisaris baru pada Juni 2015 silam. Tetapi setelahnya itu,, JFX giat melakukan edukasi dan sosialisasi baik lewat media cetak, elektronik maupun digital.

"Menurut kami, apa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan fungsi bursa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.10/ Tahun 2011 mengenai perdagangan berjangka, yaitu aktif berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Paulus.

Masih terkait dengan edukasi dan sosialisasi, di tahun 2016 JFX akan mengubah program Pojok Bursa Berjangka atau *JFX Center* yang terdapat di sejumlah perguruan tinggi menjadi *Futures Trading Learning Center- FTLC*. Dikatakan Paulus, FTLC nantinya akan melibatkan banyak pihak mulai dari kalangan kampus, perusahaan pialang, Kliring Berjangka Indonesia hingga diawasi langsung oleh Bappebti.

"Menurut kami, FTLC menjadi salah satu kunci agar masyarakat mendapat informasi, pengetahuan dan wawasan yang tepat berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Karena selama ini potensinya di daerah cukup besar, cuma karena kurang mendapatkan informasi yang tepat maka banyak masyarakat salah sasaran menempatkan jenis investasinya," ujar Stephanus Paulus Lumintang. 

KBI Wacanakan Derivatif Resi Gudang

Seiring perkembangan pesat Sistem Resi Gudang- SRG di tanah air dan upaya meningkatkan likuiditas bursa berjangka, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) berencana membuat gebrakan baru di industri perdagangan berjangka Indonesia. Gebrakan itu yakni menciptakan Derivatif Resi Gudang- DRG.

"Jujur saja produk DRG ini masih tahap wacana dan pengkajian di internal KBI. Namun menurut hemat kami, produk ini perlu dipikirkan dan didorong untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap SRG," demikian antara lain dikatakan Dirut KBI, Tris Sudarto, kepada **Buletin Bappebti**, baru-baru ini.

Kalau SRG itu 'kan lebih kepada masyarakat pertanian yang ada di daerah, tambah Tris Sudarto. Sedangkan DRG ini ditujukan untuk masyarakat yang sudah lebih paham produk-produk derivatif.

"Di samping itu, upaya ini untuk mengajak kalangan pebisnis yang sudah menjalankan skema resi gudang namun dengan pola *collateral management agreement*- CMA. Seperti kita ketahui, pola CMA ini 'kan cukup beresiko karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat seperti SRG yang diatur menurut UU No. 9 Tahun 2011. CMA itu lebih kepada saling percaya di antara pelaku," jelas Tris Sudarto.

Lebih jauh diterangkan Tris Sudarto, produk DRG yang



dimaksudkan adalah diskonto dari Resi Gudang suatu komoditi yang disimpan di gudang SRG. "Jadi komoditinya bisa apa saja. Tapi kalau menurut pikiran saya, alangkah lebih bagus kalau komoditi yang berorientasi ekspor. Sehingga secara ekonomis memiliki dampak positif terhadap perekonomian kita."

"Wacana ini masih dalam tahap pengkajian di KBI. Tetapi jika sudah siap akan dibicarakan dengan *Jakarta Futures Exchange*-JFX dan tentunya Bappebti. JFX dan Bappebti pastinya akan mendukung, karena produk ini diperdagangkan secara multilateral," tandas Tris Sudarto. 

Ekspor Timah dari Pasar Fisik BKDI Naik 12 %



Meski data ekonomi makro kurang bersahabat sepanjang tahun 2015 lalu yang ditandai dengan perlemahan perekonomian Tiongkok dan sejumlah negara industri, ekspor timah dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI meningkat sebesar 12 % dibandingkan tahun 2014.

Sebagaimana diketahui, BKDI merupakan salah satu bursa berjangka di dunia yang menyelenggarakan pasar fisik timah sejak tahun 2013 lalu.

Dari data perdagangan timah yang diselenggarakan BKDI sepanjang tahun 2015, tercatat ada sebanyak 12.933 lot, sedangkan di tahun 2014 hanya mencatatkan sebanyak 11.373 lot. Dengan perdagangan timah sebanyak 12.933 lot, ekspor timah dari BKDI mencapai 64.665 ton. Jumlah itu diperoleh dari setiap transaksi timah di BKDI yakni 1 lot setara dengan 5 ton timah.

Dirut PT Timah (Persero), Sukrisno, dalam sebuah kesempatan pernah berujar, Indonesia berkontribusi sekitar 18% dari kebutuhan dunia. Dan produksi timah Indonesia nyaris 95 % diekspor atau sekitar 5 % dikonsumsi di dalam negeri.

"Negara-negara yang menggunakan timah dari Indonesia adalah negara yang maju di bidang industri elektronika. PT Timah mengekspor timah ke berbagai negara maju, seperti Amerika dan Eropa. Tetapi ekspor yang paling banyak ke negara-negara Asia, seperti ke Jepang dan Korea Selatan," ujar Sukrisno. 



Pemerintah Optimalkan Penggunaan Karet Untuk Infrastruktur

Kementerian Perindustrian tahun ini akan lebih optimal menyerap karet alam untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga harga karet yang terus terpuruk. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan, pengoptimalan penggunaan karet alam pada proyek infrastruktur akan meningkatkan serapan karet lokal sebesar 100 ribu ton per tahun dari konsumsi saat ini 550 ribu ton.

"Jenis karet itu ada dua, alam dan sintetik. Dalam hal ini kita akan mengoptimalkan penggunaan karet alam yang dapat langsung dikonsumsi sebagai campuran aspal. Memang harga aspalnya menjadi lebih tinggi 20 %, tetapi kekuatannya jauh meningkat," ujarnya, belum lama ini.

Selain peningkatan serapan pada proyek infrastruktur, Kementerian Perindustrian juga akan mendorong penggunaan karet alam pada *dock fender* kapal, bantalan kereta yang digunakan Kementerian Perhubungan dan penggunaan karet alam pada aspal oleh lembaga terkait

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), Aziz Pane, meminta pemerintah konsisten menjalankan program hilirisasi dengan mengutamakan produk hilir karet lokal ketimbang impor yang terus menggerus utilitas produsen dalam negeri. Menurut dia, tambahan produksi karet dunia sebanyak 5 juta ton pada 2018-2020 dari Myanmar, Laos, dan Kamboja semakin memperketat persaingan industri karet global serta menjadi ancaman bagi industri karet domestik.

"Harga karet yang sangat rendah saat ini seharusnya menjadi momentum peningkatan daya saing industri karet olahan domestik. Faktanya dari total produksi 3,2 juta ton per tahun, industri dalam negeri hanya menyerap 18 %, sisanya diekspor mentah," tutur Aziz Pane.

IMF Prediksi Ekonomi Dunia Masih Tertekan

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund- IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Langkah ini dipicu beberapa faktor seperti anjloknya harga komoditas, Brazil yang terpaksa masuk ke dalam resesi karena kebuntuan politik, turunnya harga minyak dunia dan kenaikan kurs mata uang dolar.

IMF memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh 3,4 % tahun ini. Angka itu turun dari proyeksi sebelumnya 3,6 % yang dinyatakan pada Oktober 2015. Lembaga ini juga memangkas proyeksi untuk 2017 menjadi 3,6 % dari ramalan 3,8 %.

Proyeksi IMF memberikan sedikit angin segar di tengah awal yang suram bagi pasar keuangan di 2016. Indeks S&P 500 menyentuh level awal tahun terburuk sepanjang rekor, karena harga minyak dunia yang terjun bebas dan pengetatan kebijakan moneter AS.

"Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan pembuat keputusan harus memikirkan ketahanan jangka pendek, juga cara mereka meningkatkan itu. Begitu juga mengenai langkah jangka panjangnya," ujar Kepala Ekonom IMF, Maurice Obstfeld, belum lama ini.

IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,1 % tahun lalu. Level paling rendah sejak resesi 2009. Terjadi perlambatan pertumbuhan dari pasar negara maju dan berkembang sejak 5 tahun terakhir.

IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk negara berkembang dan maju ke level 4,3 % tahun ini. Turun dari proyeksi yang dibuat pada Oktober lalu 4,5 %. Revisi proyeksi tersebut naik jika dibanding pada proyeksi ekonomi global di 2015 di level 4 %.

Harga Minyak Diprediksi Belum Dapat Bangkit di 2016

Harga minyak mentah dunia sudah turun 35 % pada 2015. Bahkan harga minyak menyentuh level US\$ 30 per barel. Dan level itu belum pernah terjadi sejak krisis keuangan global.

Lembaga keuangan internasional, Goldman Sachs, juga memperkirakan rata-rata harga minyak sekitar US\$ 38 per barel pada Februari, dan lebih rendah dari 2015. Tekanan terhadap harga minyak terjadi lantaran pasokan minyak mentah tak seimbang dengan permintaan global.

Di sisi lain, permintaan minyak juga melambat di Tiongkok. Apalagi Tiongkok termasuk salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Selain itu, OPEC adalah salah satu pemain

minyak terbesar, menolak untuk memangkas produksi minyak untuk mengangkat harga. Namun, Arab Saudi yang memimpin sedang mencoba untuk memeras produsen dengan biaya yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan daerah lain.

Hal tersebut telah memunculkan persaingan baru di dalam OPEC. Karena itu, Iran sudah siap untuk kembali ke jajaran produsen minyak global. Iran yang sudah lama terkena sanksi produksi dan ekspor minyak, sekarang ingin meningkatkan produksi minyaknya. Iran berencana meningkatkan produksi minyak sebanyak 1,5 juta barel per hari pada 2016. Hal tersebut dapat membuat pasokan minyak kembali banjir di pasar global.



Aceh Coffee warehouse receipt system has reached 21 billions

Warehouse receipt system progress in our nation has shown its benefit for farmers to gain cheap funding when the market price is low.

It has been proven with the issuance of 11 coffee warehouse receipts in Middle Aceh district at the end of last November 2015. From those 11 warehouse receipts, there was 360 tons Arabica coffee stored with a value of 21,28 billion rupiah. It was said recently by Coftra's Head of Physical Market Bureau, Retno Rukmawati to Buletin Bappebti.

"We appreciate the development of warehouse receipt system in Middle Aceh district. As this is the first time in Indonesia that the value of coffee warehouse receipt has reached 21,28 billion rupiah. However, we continue to encourage Middle Aceh local government to maintain and continue this satisfying development in the future.

Therefore, we also hope that this achievement can be followed by other districts that has already implemented warehouse receipt system, She added. "We are sure that the issuance of coffee warehouse receipt will give positive impact to local economy"

Retno Rukmawati explained further that those 360 tons Arabica coffee were owned by 8 farmers group. They are; *Ketiara Queen, Ketiara Gayo, Bunge Kemang, Tunas Mude, Ulen Reduk, Bintang Kejora, Megah Raya and Mawar Berseri* farmers group. "From those 8 farmers group, the coffee quantity were varied, some has 80 tons, 40 tons and 20 tons," She said.

From the information that we received, the coffee warehouse receipt funding was done by *BRI Bank's* branch at *Takengon*. The total funding reached 12,12 billion, rupiah" Retno Rumawati added. 

The Regional rubber market will be established in the first quarter 2016

The Minister of Trade, Thomas Lembong along with Thailand Agriculture and cooperative Minister, General Chatchai Sarikulya and Malaysian Ministry of Commodity and cultivation enterprise, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, has agreed to launch regional rubber market in the first quarter 2016.

"With the existence of this regional rubber market, it can bring positive impact to global rubber price. Therefore the maturation of physical rubber starts in each country," Thomas Lembong explained to press in the middle of Minister meeting of rubber producer countries in Jakarta last December 2015.

Besides the discussion on physical rubber market launching, the meeting was also highlighted the steps that will be done by each country to increase rubber price that is very low nowadays. One of the agreements that has been established in the prior meeting in Kuala Lumpur, Malaysia is to increase domestic rubber absorption by 10% each year in each 3 country.

The domestic consumption in each producer country nowadays only reached 5.9% from total production of 1,58 metric ton in 2014, then became 1,67 metric ton in 2015. And in 2016 in specific all 3 countries has agreed to use 300 thousand tons rubber that they produced as ingredient mixture for asphalt used for highway construction project.

"All 3 countries will continue the effort to use rubber for domestic infrastructure," Thomas Lembong added. 

JFX to revitalize Sharia Futures Trading

Jakarta Futures Trading – JFX at the end of 2015 has prepared the product launching of Sharia Futures trading. It is planned to be launched in the second quarter of 2016.

As a big picture, JFX in the last couple years has launched Sharia Futures Trading. However the implementation has faced some obstacles such as licensing from Bank of Indonesia as Sharia bank authority. In the future, Sharia banking will be one of the executants that has strategic roles in Sharia Futures Trading mechanism.

"Sharia bank's activities are under Bank of Indonesia's regulation therefore we necessarily need to adjust to current regulation in Bank of Indonesia," JFX's director, Stephanus Paulus Lumintang said recently.

On the other side Paulus said that to revitalize Sharia futures trading in JFX, his company has coordinated with Sharia Banks that will take part. They are Sharia Mandiri Bank, Muammalat Bank and *Bank Rakyat Indonesia Syariah*.

"We continue to coordinate and approach the commodity executor that will be the undelying asset of Sharia Futures Trading. Currently the commodity that we have been considered as the underlying asset of Sharia Futures Trading are crude palm oil, coffee, seaweed, and cashew," Paulus explained.

According to Paulus, in recent times Sharia banking has experienced liquidity reduction but at the other side the funding stored in Sharia banking is quite enormous.

"Therefore we hope that Sharia Futures trading can be a solution to improve Sharia Banking performance," Stephanus Paulus Lumintang emphasized. 



0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

+62818-0531-xxxx

Tanya;

Dimana saya bisa melihat daftar perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti?

Jawaban:

Yth Bapak/Ibu, untuk Informasi daftar Perusahaan Pialang Berjangka dapat di akses melalui web Bappebti :www.bappebti.go.id pada kolom Pelaku Usaha atau dapat diakses secara langsung di <http://bappebti.go.id/id/api/pialang/index.html>

Terima kasih.

+62823045xxxxx

Tanya;

Selamat siang bapak/ibu di BAPPEBTI. Apakah BROKER FBS yang menawarkan deposit minimal \$250 itu legal atau penipuan. Yang saya lihat di internet, kantornya beralamat di J.L.M.H. Thamrin Kav.9 Jakarta. Apakah itu benar? Bagaimana dengan broker ETORO? Mohon infonya..

Jawaban:

Yth Bapak/Ibu. Broker yang Anda maksud tidak mendapat izin dari Bappebti. Mohon berhati-hati. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs resmi www.bappebti.go.id Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Clear

The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member.

2. Clearing

The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract.

3. Clearing Corporation

An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it, reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all.

4. Clearing

Margin Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers' open futures and options contracts.

5. Clearing Member

A member of the Clearing House or Association. All trades of a non-clearing member must be registered and eventually settled through a clearing member.

6. Clearing Price

See Settlement Price.

7. Clearinghouse

An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin.

8. Close end Funds

Managed investment which is listed on the stock exchange. The price of its shares will be determined according to demand and supply.

9. Close Out

To trade an equal and opposite futures transaction to that already held. See also offset.

10. Close, The

The period at the end of the trading Session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the close".



REKAPITULASI RESI GUDANG PERIODE DESEMBER 2015

NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN				PEMBIAYAAN			
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Volume Komoditi (Ton)	"Harga (Rp/ kg)"	" Nilai Barang (Rp) "	Jumlah Resi Gudang	" Nilai (Rp) "	Bank/ LKNB
1	PT. PERTANI (PERSERO)								
	- Gudang Banyuwangi	Gabah	2	83,06	5.698	473.300.000	2	331.310.000	Bank Jatim
	- Gudang Jombang	Gabah	1	50,00	6.000	300.000.000	1	210.000.000	Bank Jatim
	- Gudang Mojokerto 1	Gabah	1	80,00	6.000	480.000.000	1	330.000.000	Bank Jatim
2	PT. BGR (PERSERO)								
	- Gudang Kebumen *	Gabah	1	2,55	5.700	14.535.000	-	-	-
	- Gudang Wonogiri *	Gabah	2	15,95	a 5.376	85.750.000	1	46.000.000	Bank Jateng
	- Gudang Pandeglang *	Gabah	5	25,00	4.510	112.750.000	-	-	-
	- Gudang Aceh Tengah *	Kopi	9	360,00	58.889	21.200.000.000	8	13.160.000.000	BRI
	- Gudang Kuningan *	Gabah	2	10,00	5.600	56.000.000	-	-	-
	- Gudang Katingan *	Rotan	1	5,56	8.000	44.512.000	-	-	-
	- Gudang Polewali Mandar *	Gabah	1	5,00	4.600	23.000.000	-	-	-
	- Gudang Makassar (Agroniaga)	Rumput Laut	1	75,15	6.000	450.900.000	-	-	-
	- Gudang Wakatobi *	Rumput Laut	1	10,42	2.500	26.040.000	-	-	-
	- Gudang Gowa *	Gabah	1	5,01	4.600	23.064.400	-	-	-
- Gudang Palu *	Rotan	1	5,182	7.000	36.274.000	-	-	-	
3	KOPERASI NIAGA MUKTI								
	- Gudang Cianjur *	Gabah	3	43,05	7.303	314.400.000	3	220.000.000	BJB
4	KOSPERMINDO								
	- Gudang Makassar (Kospermindo)	Rumput Laut	1	25,00	6.000	150.000.000	-	-	-
JUMLAH		Gabah	19	319,62		1.882.799.400	8	1.137.310.000	
		Kopi	9	360,00		21.200.000.000	8	13.160.000.000	
		Rotan	2	10,75		80.786.000	0	-	
		Rumput Laut	3	110,57		626.940.000	0	-	
TOTAL			33	800,94		23.790.525.400	16	14.297.310.000	

BAPPEBTI



Bee,,, kamu mau ke mana?
Kok barang bawaan mu banyak begitu?

Aku mau ke luar kota, Peb. Aku dan beberapa teman mendapat tugas penyuluhan dan pendampingan petani untuk menggunakan SRG.

Wao,,,? Jadi kamu akan tinggal di desa bersama petani?

Begitu 'deh

Emangnya petani gak bisa belajar sendiri menggunakan SRG, Bee?

Prosedur penerbitan Resi Gudang itu seperti apa 'sih Bee?

Gampangannya, petani membawa komoditi hasil panen ke gudang SRG. Lalu oleh petugas Pengelola Gudang melakukan verifikasi jumlah dan nilai komoditi berdasarkan referensi harga. Kemudian data itu diinput dan dilaporkan ke Pusat Registrasi secara online.

Lalu, Resi Gudang langsung terbit???

Tentu belum, Peb. Karena, Pusat Registrasi pun akan melakukan berbagai macam verifikasi seperti legalitas Pengelola Gudang, lembaga uji mutu, jenis barang, asuransi, waktu jatuh tempo simpan komoditi dan nilai komoditinya.

'Nah, kalau verifikasi itu sudah selesai dan tidak ada masalah, maka Pusat Registrasi akan mengirimkan laporan ke Pengelola Gudang. Kemudian Pengelola Gudang pun menerbitkan dokumen Resi Gudang yang sudah dilengkapi kode pengamanan.

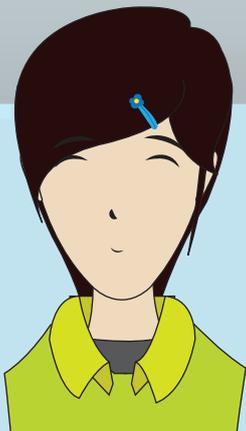
Prosedur Penerbitan RG

Pebti : Sudah, begitu saja?

Mr. B : Sempel 'kan,,? Prosesnya juga gak lebih dari 1 jam, kok.

Pebti : Lalu dengan Resi Gudang itu petani bisa ke bank untuk memperoleh pembiayaan 'kan, Bee???

Mr. B : Nah, kamu pun sudah pinter deh,,,



Tapi Bee, aku akan kangen 'deh sama kamu.
Lama gak nantinya di desa?



Potensi Bawang Merah Sebagai Subjek SRG

Bawang merah (*Allium cepa*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai kandungan gizi dan senyawa yang tergolong zat non gizi serta enzim yang berfungsi untuk terapi, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tubuh serta memiliki aroma khas yang digunakan untuk penyedap masakan. Bawang merah, seperti bawang putih, dan bawang-bawangan termasuk famili *Lilyceae* berasal dari Asia Tengah.

Dilihat dari segi ekonomi, usaha bawang merah cukup menguntungkan serta mempunyai pasar yang cukup luas. Konsumsi bawang merah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 725.000 ton, dan konsumsi bawang merah ini meningkat sekitar 5 % setiap tahunnya sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri makanan olahan.

Selain itu peluang ekspor bawang merah segar masih terbuka luas, selain akibat peningkatan konsumsi, peningkatan pemanfaatan bawang merah untuk terapi kesehatan. Musim panen (tanam) bawang merah di Indonesia saling melengkapi dengan negara lain,

dalam arti, bilamana di negara lain misalnya daratan Tiongkok sedang musim tanam, maka di Indonesia sedang panen raya, dan sebaliknya. Sehingga kondisi ini memberi peluang masuknya bawang merah impor berasal dari Tiongkok, Filipina dan India masuk secara legal maupun ilegal, atau sebaliknya dapat memberi peluang ekspor bawang merah bilamana konsumsi dan kebutuhan industri bawang merah dalam negeri telah dipenuhi.

Penyimpanan bahan baku komoditi bawang merah dengan memanfaatkan Sistem Resi Gudang- SRG merupakan salah satu alternatif yang perlu dikaji keefektifitasannya guna membantu petani pengumpul, pedagang bawang merah maupun industri pengguna dan pengolahan bawang merah. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit.

SRG untuk saat ini dapat menjadi salah satu terobosan yang diberikan

oleh pemerintah untuk membuka akses kredit bagi pemilik komoditi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, pemanfaatan SRG sampai dengan saat ini masih terbatas pada komoditi pangan seperti gabah, jagung dan beras serta hasil perkebunan seperti kopi dan kakao. Berdasarkan kondisi tersebut, Bappebti perlu mengadakan kajian-kajian terhadap komoditi yang dapat menjadi subjek resi gudang yang di antaranya mencakup kajian mengenai kecukupan kebutuhan untuk manajemen resiko harga, kajian mengenai proporsi kepemilikan dari komoditi subjek resi gudang yang dapat menjadi basis penentuan apakah suatu komoditas layak sebagai subjek dari resi gudang.

Potensi bawang konsumsi masuk dalam komoditi yang dapat dijadikan subyek SRG belum layak berdasarkan aspek : a. Sifat komoditi yang *perishable good* (mudah busuk). Bawang konsumsi harus dalam bentuk segar yang tidak mengalami perubahan warna sehingga memerlukan ekstra penanganan ketat agar tidak busuk. b. Masa simpan. Bawang konsumsi paling lama hanya disimpan 40 (empat puluh) hari, terlalu singkat untuk



disimpan. Teknologi untuk *cold storage* sudah ada dengan masa simpan sampai dengan maksimal 6-8 bulan tetapi belum dilakukan kajian biaya dan kelayakannya untuk bawang merah. c. Metoda penyimpanan. Teknologi penyimpanan masih mengandalkan *cold room system (cold storage)* sehingga menyebabkan biaya tinggi. d. Pergudangan bawang di Brebes meliputi Gudang Kering yang selama ini digunakan sedangkan Gudang *cold storage* baru diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir. Petani lebih banyak menggunakan gudang kering milik sendiri atau Pengirim (pembeli bawang terakhir di pasar) menggunakan Gudang Kering sendiri yang lebih luas. Gudang *cold storage* dinilai lebih baik dibanding gudang biasa karena penyusutan di *cold storage* sebesar 10% dibanding di gudang biasa sebesar 30%. Biaya sewa di gudang biasa sebesar Rp 200,- per kg bawang merah, sedangkan biaya sewa untuk *cold storage* sebesar Rp 250,- per kg bawang merah sehingga biaya penyimpanan tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan penyusutan. Untuk penyimpanan dengan *Cold storage* masih diperlukan data umur simpan terhadap kualitas bawang merah karena sampai saat ini belum ada yang menggunakan dari pihak Petani dan Pedagang Brebes.

Kesimpulan Untuk kebijakan SRG perlu mempertimbangkan:

1. Harga bawang merah sangat berfluktuasi dengan kondisi yang tidak tercatat dan sangat dipengaruhi kondisi pasokan saat ini (Harga ditentukan pasar secara bebas dan perubahan dapat per jam) dan pedagang Brebes sangat mengedepankan kontinuitas *supply* dan untuk resiko rugi dapat ditutup dengan harga yang bagus pada hari yang lain).
2. Sudah ada standar kualitas bawang merah (43/KEP/BSN/2/2013 yang merevisi SNI 01-3159-1992), yang secara detail, tetapi di pasar/perdagangan standar bawang merah berdasarkan *grade* yang disepakati antar pelaku dengan harga yang fluktuatif dan tidak tercatat.
3. Sifat bawang merah jika disimpan maka akan terjadi penyusutan yang tergantung umur simpan dan metode simpan. Pada gudang biasa dengan metode rak dan sirkulasi pengasapan periodik yang baik dapat tahan sampai dengan 40 hari untuk bawang merah konsumsi (layak jual) dan bawang merah bibit maksimal 3 bulan (hal ini berdasarkan wawancara dan belum ada penelitian ilmiah yang terkait). Untuk bibit tidak dapat disimpan di *Cold Storage*. Penyimpanan bawang merah dengan *Cold Storage* belum ada data terhadap umur simpan, kualitas dan biayanya. Dengan *Cold storage* perlu dipertimbangkan biaya operasional pada saat kosong dan operasi tetap ada *fixed cost* dimana perlu dihitung apakah biaya ini tertutupi dengan margin kenaikan harga bawang merah dan umur simpan dan kualitasnya.
4. Jika ada *Cold storage* makan dapat digunakan untuk penyimpanan bawang merah konsumsi dan multi produk karena dari biaya operasional, jika hanya untuk bawang merah tidak akan *feasible/layak* (Berdasarkan wawancara dengan PT. CMA, perlu studi lebih lanjut)
5. Sudah ada lapak dan gudang perseorangan yang saat ini dapat dimanfaatkan sebelum dilakukan pengiriman antar kota
6. Untuk komoditas bawang merah perlu pengaturan dari sektor petanian hulu dimana jika produksi bagus maka akan dapat menekan harga, jika tidak ada barang maka harga akan melambung
7. Perlu dihitung kembali *supply demand* dengan data riil di Lapangan karena data yang sebenarnya tidak tersedia dan juga perlu dihitung *supply demand* secara nasional untuk stabilisasi harga.
8. Tata niaga di Brebes sudah dijalankan sangat erat antar para pelaku dan sudah ada jaringan ke pasar lokal, antar pulau dan Jakarta dengan informasi personal tidak tercatat secara sistem dan belum dapat diakses oleh Dinas atau Pemerintah karena merupakan rantai bisnis.
9. Para penebas/pedagang sangat mudah mendapatkan pendanaan secara personal dengan pemodal tanpa administrasi yang repot karena kebutuhannya yang cepat, perbankan kadang dirasakan terlalu lama dan perlu jaminan. Perbankan banyak diakses oleh pedagang besar untuk penyimpanan dana dan modal (BNI, BRI dan BCA).
10. Impor bawang merah diperlukan untuk bulan 4-6 dengan pengaturan sehingga tidak merusak tata niaga (Untuk bawang merah lokal dan ASEAN masih kompetitif dari segi harga tetapi untuk bawang india dapat merupakan ancaman karena harga yang murah tetapi kualitas dan rasa tetap berbeda dengan bawang merah Brebes).
11. Ketersediaan lapak dan infrastruktur pasar swasta di Brebes sudah tumbuh dan sangat mengakar di masyarakat
12. Pertanian hulu di sektor produksi harus dibenahi dulu untuk produksi yang baik dengan bibit, obat dan pupuk yang terjamin sehingga jika produksi melimpah maka harga akan stabil.
13. Perlu dikembangkan industri hilir pengolah bawang merah (seperti bawang goreng dan bumbu instan dll) sehingga hasil panen bawang merah dapat ditampung industri.
14. Perlu dibuat sistem informasi bawang merah yang dapat diakses masyarakat secara mudah.
15. Penguatan kelembagaan Gapoktan sehingga petani akan mempunyai kemampuan bertani dan manajemen pasca panen yang lebih baik. 📍

*) Ary Miftakhul Huda *Analisis Perdagangan di Biro Analisis Pasar Bappebti*



Tris Sudarto

Riuh Rendah Pimpin KBI

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) di bawah naiknya Tris Sudarto, terus berupaya menjadikan industri perdagangan berjangka komoditi yang transparan dan terpercaya.

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI telah berdiri sejak tahun 1984. Dalam perjalanannya hingga saat ini, KBI aktif menggeluti tiga bidang usaha. Diantaranya, sebagai lembaga kliring di bidang PBK, sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi pada pasar fisik komoditas.

Dalam usahanya di bidang PBK maupun pasar fisik komoditas, KBI selalu seiring sejalan dengan bursa berjangka Jakarta Futures Exchange- JFX. Perannya sangat penting, yaitu untuk menyediakan layanan terbaik atas penjaminan

penyelesaian transaksi kontrak berjangka. Singkatnya, KBI dapat dikatakan sebagai benteng pertahanan yang menjaga integritas keuangan di industri PBK.

Sebagai upaya untuk itu, langkah yang dilakukan KBI yaitu *law enforcement*-penegakan hukum yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dan ketentuan kewajiban keuangan Anggota Kliring. Dalam praktiknya, hal itulah yang menjadi tantangan terbesar Tris Sudarto sejak resmi menerima amanat sebagai Direktur Utama KBI, pada 24 Oktober 2012 silam.

Tentunya, karena itu diperlukan komitmen yang kuat bagi Tris sebagai orang nomor satu di perusahaan yang

berada di bawah Kementerian BUMN ini. "Kami terus berupaya mendorong integritas para pelaku pasar," ujar Tris, sapaan akrab Tris Sudarto kepada **Buletin Bappebti**, baru-baru ini.

Menurutnya, KBI sebagai pihak yang mengelola integritas finansial di industri PBK, sangat berkepentingan dengan *segregated account*- rekening terpisah pialang berjangka.

Meski begitu, lanjut Tris, masih ada saja oknum perusahaan pialang yang menyalahgunakannya. Walau pun dari waktu ke waktu jumlahnya semakin menurun.

Karenanya, bagi pria kelahiran Jakarta, 19 Januari 1964, ini, sangat penting mendorong agar semua pialang dapat menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, untuk aturan modal bersih disesuaikan, modal disetor, serta kewajiban pialang memenuhi kewajiban margin. "Hal-hal tersebut secara lebih ketat kami berlakukan sejak tahun 2014."

Satu contoh, KBI telah mewajibkan pialang untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada pagi hari sebelum dimulainya jam perdagangan. Dengan itu, KBI telah berupaya agar pialang lebih tepat waktu untuk memenuhi kewajiban keuangan. "Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka kami harus lebih memperketatnya," ujar Tris.

Pada awalnya, tambah Tris, ada juga pialang yang mengeluh. Tapi dia yakin, dalam jangka panjang, kalau pialang disiplin, maka mereka juga yang akan diuntungkan. "Karena industri PBK akan menjadi lebih terpercaya. Dengan demikian, transaksi akan lebih meningkat."

Contoh lainnya, Tris bilang, telah dilakukan juga pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penyimpanan Dana Margin Anggota Kliring dengan proporsi 70 : 30 (sesuai PerKa Bappebti No. 117 Tahun 2015). "Jika pialang tidak menyalahgunakan, tentu saja itu tidak memberatkan. Itu uang nasabah kok, lalu apa beratnya?"ungkap Tris.

Selain itu, pada 10 November 2015, KBI juga telah meluncurkan Sistem Informasi



Transaksi Nasabah- SITNa. Dengan SITNa, setiap nasabah yang melakukan transaksi kontrak berjangka dapat juga memonitor hasil transaksinya secara *real time* dari waktu ke waktu. Dengan demikian, nasabah bisa memantau dana kelola investasinya dan meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan dana oleh pialang. Di samping efektif melindungi nasabah, SITNa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga dapat meningkatkan nilai transaksi di bursa berjangka.

"Kami terus mendorong SITNa, kami *update* terus dan kami dorong agar seluruh pialang mau memberikan hak akses kepada nasabah," tutur Tris.

Tercatat hingga Januari 2016 yang telah mendaftar ke SITNa ada sebanyak 47 perusahaan pialang berjangka dari total 58 anggota Anggota Kliring. Sedangkan perusahaan pialang berjangka yang telah memberikan hak aksesnya kepada nasabah sebanyak 15 perusahaan. Dan, jumlah akun nasabah yang telah diberi akses sebanyak 2.275.

"SITNa sudah efektif berjalan, tinggal terus mendorong para pelaku pasar agar memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan perlu diketahui, perubahan PTT-Peraturan Tata Tertib kami sudah disetujui otoritas. Itu artinya, pelaku pasar berkewajiban memberi layanan informasi transaksi kepada nasabahnya," terang Tris Sudarto.

Produk Kemas dan DRG

Dalam pengembangan pasar fisik, KBI melakukan sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya. Misalnya pada 2014 lalu, KBI bekerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) meluncurkan produk KBI-eMas atau KeMas. Dalam pasar fisik emas retail ini, KBI memberikan layanan jasa pembelian, penjualan kembali, penyimpanan dan pengambilan emas produk PT Pegadaian (Persero) yang bersertifikat ANTAM atau Pegadaian.

"KeMas itu merupakan produk

sinergitas antar BUMN (KBI, Pegadaian dan ANTAM). Yang tujuannya mendorong masyarakat menengah ke bawah untuk berinvestasi emas. Jadi masyarakat dapat menabung berapa pun nominalnya dan dikonversikan menjadi emas," terang Tris.

Tak kalah menarik, KBI rencananya akan mengembangkan produk Derivatif Resi Gudang- DRG yang dapat ditransaksikan di JFX pada tahun 2016 ini.

"Namun DRG masih dalam tahap kajian, tapi sudah ada keinginan dari banyak para pelaku pasar," ungkap pria berdarah Tegal ini.

Dia menambahkan, jika SRG berbicara dari sisi hulu, maka DRG mengambil dari sisi hilirnya. Jadi DRG merupakan jenis surat berharga yang di-*backup* dengan Resi Gudang. Dan dokumen itu dapat didiskontokan dan pembayarannya penuh- *full payment*.

Selain itu, ada beberapa perbedaan antara SRG dengan DRG. Pertama, acuan dalam DRG adalah tingkat bunga pasar, sedangkan acuan dalam SRG adalah pergerakan harga komoditi. "Investor yang ingin membeli DRG tidak harus mengenal komoditinya. Mereka hanya berpikir, berapa persen diskon yang didapatkan," ujar Tris.

Kedua, DRG dapat digunakan oleh seluruh pelaku bisnis tanpa pengecualian seperti halnya dalam SRG. Jadi, pemilik komoditas DRG tidak terbatas hanya untuk petani, koperasi, maupun UKM. Terakhir, "Dalam DRG harus sudah berbicara *market price*, termasuk pembiayaannya harus sudah pembiayaan harga pasar dan tingkat suku bunga umum," ucap Tris.

Bagi-bagi Ilmu

Jejak karir ayah dari dua orang putra ini tergolong sudah cukup panjang di BUMN. Dia mengawali karirnya sebagai PNS sejak tahun 1984 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu, pada tahun 1986 hingga 1994, dia juga sempat merasakan menjadi Auditor di BPKP, Pertamina dan Bank Indonesia. Barulah kemudian, pada tahun 1994, dia resmi

bergabung di KBI. "Sejak itu, saya mulai pindah dari satu divisi ke divisi lainnya di KBI," tuturnya.

Sebagai catatan, Tris pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi PT KBI (1994-1996), Manajer Akuntansi dan Pelaporan PT PAN (1996-2000), Manajer Pengelolaan Risiko PT KBI (2000), Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT KBI (2000-2007), Pejabat Sementara Divisi Teknologi Informasi PT KBI (2005-2007) dan Komisaris PT PAN (2001-2003).

Selanjutnya, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT KBI (Persero) sejak 27 Agustus 2007 hingga Desember 2010. Lalu, pada 30 Juli 2012, Tris pernah ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama KBI. Kemudian, Tris resmi diangkat Kementerian BUMN menjadi Dirut KBI sejak 24 Oktober 2012.

Berbicara di bidang pendidikan, Tris pernah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara- STAN Departemen Keuangan pada tahun 1992. Lalu, dia juga memperoleh gelar Magister Sains (Msi) Program Studi Pengembangan SDM dari Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Tak berpuas diri, saat ini, dirinya masih mengejar gelar doktor untuk Program Manajemen SDM di Universitas Negeri Jakarta. Dengan bekal itu, Pria yang hobi bermain catur dan *jogging* ini, berencana ingin terjun ke dunia akademisi.

"Kelak saya pensiun, ingin menjadi dosen. Dulu memang sempat pernah mengajar sebagai dosen. Tapi karena keterbatasan waktu, sekarang hanya jadi pembicara dalam pelatihan-pelatihan saja," ungkap Tris.

Lalu bagaimana karirnya dengan di KBI?

"Tugas menjadi direksi itu hanya sampai dua periode. Artinya, jika tidak lagi mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengelola perusahaan BUMN, saya ke dunia kampus saja. Ilmu yang sudah saya peroleh, saya coba bagi-bagilah ke orang lain," jawab Tris Sudarto. 

BIJAK BERINVESTASI



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti
www.bappebti.go.id